

**OPTIMALISASI SUMBERDAYA LOKAL
UNTUK PENINGKATAN KUALITAS
SUMBERDAYA MANUSIA (SDM)**

3

Dr. Dahrul Syah

Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan,
Fakultas Teknologi Pertanian - IPB

A. *Indigenous Resources*

Indigenous resources yang didefinisikan sebagai “*set of knowledge and technology existing and developed in, around and by specific indigenous communities (people) in an specific area (environment)*” merupakan salah satu faktor yang diperlukan dalam membangun agroindustri pangan lokal. Faktor lain yang tak kalah pentingnya adalah nilai tambah, yang merupakan unsur penggerak dasar hampir setiap jenis bisnis, yang menarik para investor untuk menanamkan modalnya. Dengan semakin ketatnya persaingan bisnis, maka dunia usahaselalu mencari keunggulan kompetitif berdasarkan nilai tambah yang diciptakan.

Penumbuhan industri penghasil nilai tambah yang berbasiskan potensi lokal, dengan kata lain optimalisasi sumberdaya lokal, merupakan strategi jitu untuk menggerakkan ekonomi daerah berdasarakan potensi yang dimilikinya. Nilai tambah yang didapat inilah yang diharapkan dapat menciptakan atau menumbuhkan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitarnya. Dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini disertai dengan keragaman potensi lokal di seluruh Indonesia akan semakin membuka peluang terlaksananya stategi tersebut.

Kedua faktor sumberdaya lokal dan nilai tambah, harus diintegrasikan dalam membangun agroindustri pangan lokal. Dengan kata lain seluruh sumberdaya lokal atau *indigenous resources* dioptimalkan untuk (a) menggerakkan ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan akses ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan pendapatan, serta (b) meningkatkan keragaman konsumsi melalui

berbagai menu yang dikembangkan dari bahan tersebut. Dengan demikian maka secara berangsur-angsur akan terjadi peningkatan kualitas sumberdaya masyarakat setempat melalui tersedianya lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

B. Ketahanan Pangan-Gizi dan Kualitas SDM

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia. Apabila konsumsi pangan tidak cukup dalam jumlah dan mutu maka akan menyebabkan gizi kurang/gizi buruk. Gizi buruk/gizi kurang akan menyebabkan daya tahan tubuh rendah, mudah sakit, produktivitas rendah, tumbuh kembang otak tidak optimal, potensi pendidikan rendah. Kondisi inilah yang menyebabkan indeks pembangunan manusia menurun yang dicirikan dengan menurunnya umur harapan hidup, pendapatan per kapita menurun dan tingkat melek huruf menurun.

Kondisi yang terjadi dapat disebabkan oleh rendahnya akses masyarakat terhadap pangan. Akses terhadap pangan dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek fisik dan ekonomi. Aspek fisik yaitu aspek yang terkait dengan lokasi dan kondisi-kondisi geografis yang dapat menghalangi akses masyarakat terhadap pangan. Sedangkan aspek ekonomi lebih banyak berhubungan dengan kemampuan seseorang atau masyarakat untuk membeli bahan pangan, yang dengan kata lain adalah aspek yang berhubungan dengan daya beli. Berbagai studi menunjukkan adanya hubungan yang erat antara kemiskinan, daya beli dan kejadian-kejadian kerawanan pangan (Flores, 2001).

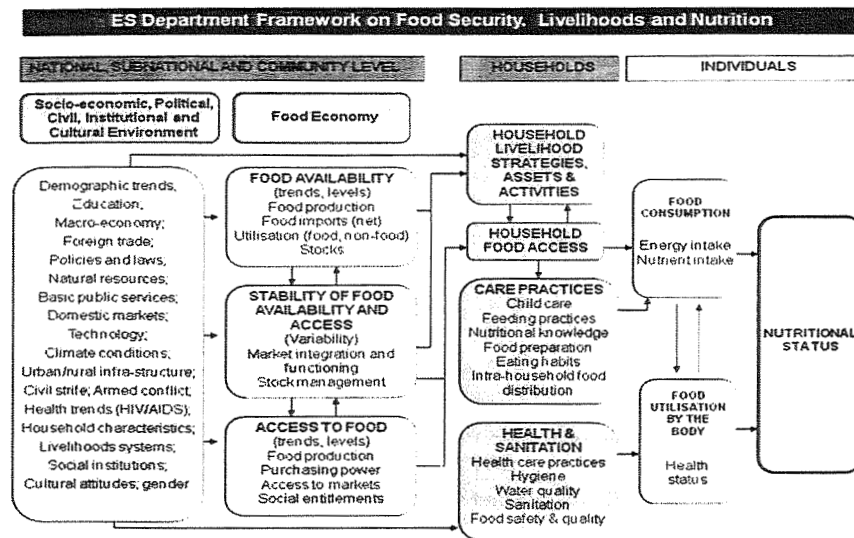
Dalam konteks ilmu ekonomi, daya beli berhubungan erat dengan pendapatan masyarakat yang timbul karena adanya aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Tolok ukur yang digunakan untuk menilai aktivitas ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya pertumbuhan ekonomi menyerap tenaga kerja sehingga masyarakat mendapatkan sumber mata pencaharian dan sekaligus pendapatan. Namun sayangnya, menurut Siregar (2007), terjadinya pertumbuhan ekonomi pada kurun waktu antara tahun 2000-2006 belum cukup kuat untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Hal tersebut dapat diakibatkan oleh tingkat pertumbuhan

yang kurang atau pertumbuhannya kurang bermutu karena lemahnya keterkaitan sektor hulu dan hilir.

Dalam perspektif ketahanan pangan, UU nomor 7 tahun 1996 telah mengamanatkan bahwa upaya mewujudkan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Strategi utama untuk mencapai hal tersebut diformulasikan dengan sangat baik dalam pernyataan sebagai berikut: "Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya pangan, kelembagaan dan budaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan gizi, baik jumlah maupun mutu yang dibutuhkan pada harga yang terjangkau, dengan memperhatikan peningkatan pendapatan petani/nelayan serta produksi yang diatur dengan undang-undang". Dengan demikian maka pemerintah dan masyarakat, termasuk masyarakat bisnis dan akademisi, bertanggung jawab dalam membangun ketahanan pangan yang termasuk didalamnya penumbuhan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan akses terhadap pangan.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan-gizi (**Gambar 1**) dan meningkatkan kualitas SDM adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi sumberdaya lokal untuk meningkatkan ketersediaan pangan, meningkatkan akses ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan pendapatan, serta meningkatkan pola konsumsi, pengasuhan dan kesehatan lingkungan yang baik.
2. Meningkatkan peran komunitas dan kapasitas pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berpusat pada sumberdaya yang dimilikinya melalui suatu jaringan kerjasama yang sinergi antara berbagai lembaga litbang, industri pangan dan pemerintah daerah.



Gambar 1. Kerangka pemikiran ketahanan pangan dan gizi

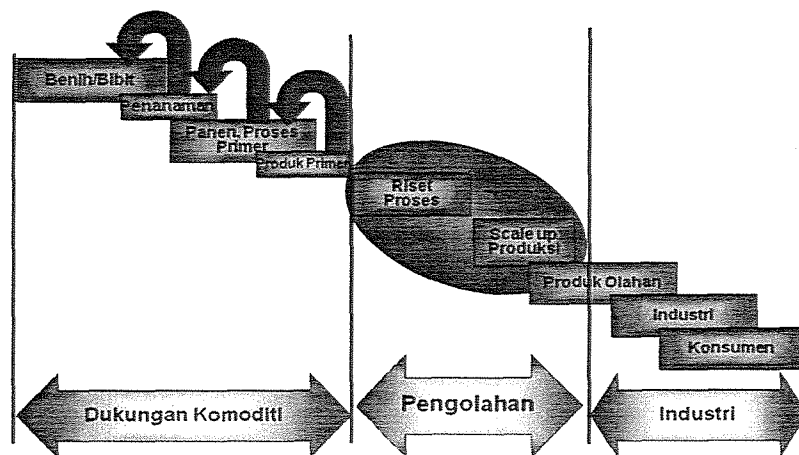
C. Kedaulatan Pangan (*Food Sovereignty*)

Kedaulatan pangan didefinisikan sebagai *"RIGHT of peoples, communities, and countries to define their own agricultural, labour, fishing, food and land policies which are ecologically, socially, economically and culturally appropriate to their unique circumstances: (a) Right to food and to produce food; (b) Right to safe, nutritious and culturally appropriate food; (c) Right to food-producing resources and; (d) Right to sustain themselves and their societies.*

Kedaulatan pangan menekankan pada cara penyediaan yang lebih sesuai dengan sumberdaya indigenousnya secara berkelanjutan. Sedangkan ketahanan pangan menekankan pada pengelolannya sehingga bermuara pada status gizi yang optimal.

Keduanya dapat dipadukan dengan satu strategi sehingga dapat dikatakan ketahanan pangan yang berdaulat. Namun apakah ini merupakan jalan keluar bagi permasalahan pangan di Indonesia, masih

banyak yang harus dieksplorasi. Untuk itu, maka yang perlu kita perhatikan adalah keterkaitan antara hulu dan hilir. Jangan sampai terjadi ketidaksesuaian antara yang ditanam di hulu dengan yang diolah di hilir, misalnya yang ditanam ubijalar, yang diolah secara terus menerus terigu, sehingga berdampak pada penurunan harga pangan. Hal inilah yang menjadi masalah laten terus-menerus. **Gambar 2** berikut menunjukkan keterkaitan dari hulu ke hilir untuk mewujudkan ketahanan pangan.

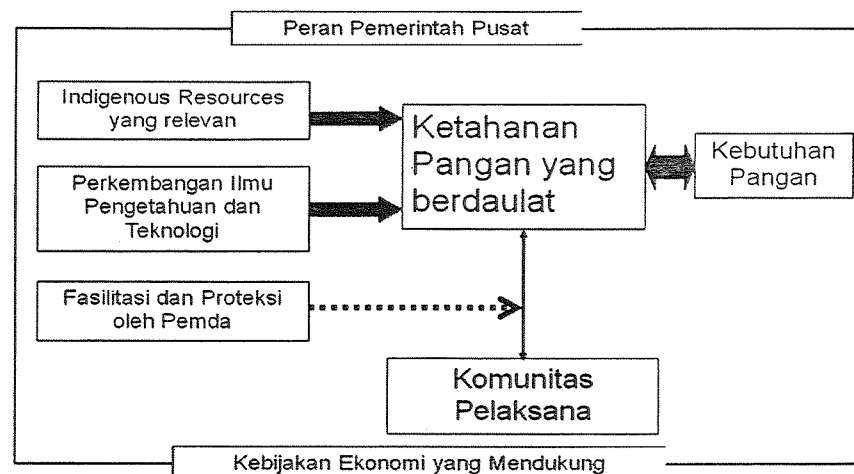


Gambar 2. Keterkaitan hulu dan hilir

D. Strategi

Ketika berbicara mengenai strategi untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berdaulat tentu saja terkait dengan kebutuhan pangan dasar untuk menopang hidup yang layak bagi masyarakat. Ketahanan pangan yang berdaulat dapat dicapai dengan mengidentifikasi *indigenous resources* yang relevan untuk menumbuhkan hal tersebut, serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memfasilitasi dan melancarkan pemanfaatan potensi lokal yang tersedia. Ini semua harus dilaksanakan oleh komunitas pelaksana dengan adanya fasilitasi dan proteksi oleh Pemda. Sedangkan

pemerintah pusat berperan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan perekonomian yang mendukung kebijakan fiskal dan moneter dengan insentif yang tinggi (**Gambar 3**). Apabila ini dijabarkan maka terdapat beberapa ciri-ciri kegiatan baik di tataran makro, meso maupun mikro.



Gambar 3. Strategi pencapaian ketahanan pangan yang berdaulat

1. Tataran Makro

Pada tataran makro harus tercipta kebijakan ekonomi yang memberikan insentif bagi tumbuhnya agroindustri pangan lokal dari hulu sampai kehilir. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya kebijakan sektor keuangan yang mendukung masuknya kekayaan biodiversitas dalam rantai bisnis pangan di Indonesia. Misalnya untuk komoditas kakao, pengolah kakao dalam negeri banyak yang mengeluh karena apabila mengekspor tidak kena pajak sedangkan apabila pengolah kakao beli biji kakao kena pajak 10%. Tampak dari kejadian ini bahwa produsen kakao sudah membeli bahan baku lebih mahal dibanding Singapura dan Malaysia. Masalah ini tidak lagi terjadi pada

tataran teknologi melainkan pada saat melakukan lobi, tampaknya peran pedagang dan politisi lebih kental dibanding dengan hal-hal lain. Selain itu diperlukan kebijakan departemen teknis yang mendorong pemda untuk memfasilitasi dan menginkubasi pangan lokal untuk melindungi implementasi strategi ketahanan pangan yang berdaulat.

2. Tataran Meso

Pada tataran meso harus tercipta fasilitasi, inkubasi dan proteksi dari pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan daya saing ekonomi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan di berbagai dinas/sektor sehingga terjadi penurunan *overhead cost* dan meningkatkan efisiensi.

3. Tataran Mikro

Pada tataran mikro harus terdapat komunitas bisnis yang dapat menumbuhkan agroindustri pangan lokal dengan kelembagaan yang sehat. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara terintegrasi di tingkat komunitas. Untuk itu bentuk, pola kerja dan tata hubungan antar seluruh pemangku kepentingan harus dibangun berdasarkan kearifan-kearifan lokal yang ada. Peran lembaga pemerintah termasuk akademisi adalah mendampingi seluruh pemangku kepentingan agar proses bisnis berjalan dengan lancar dan berkeadilan. Dengan demikian maka, masukan IPTEKS yang sesuai, penyelesaian masalah teknis dan manajerial, *Exit Policy* dengan luar komunitas dan penguatan kapasitas dapat dimanfaatkan dan dilaksanakan secara optimal.

E. Skenario di Komunitas

Apabila dilakukan pemetaan berdasarkan pendapatan maka ada golongan I (rendah), golongan II (menengah) dan golongan III

(tinggi). Apabila berbicara dengan SDM maka perlu ada makanan, sehingga pada golongan I tidak mampu membeli makanan maka diberi tambahan makanan, pada golongan II dilakukan perbaikan ekonomi dengan mengidentifikasi apa yang ada disana. Pada semua golongan ini diberikan pendidikan gizi. Komunitas ini artinya kecamatan/kabupaten maka perlu dilihat berdasarkan proporsi yang ada. Berdasarkan pengalaman yang sudah dilakukan di tingkat Kabupaten Trenggalek, Bogor dan Takalar (Makasar), terbukti bahwa pemerintah daerah sangat berperan.

Di negara-negara berkembang, kita sulit untuk masuk ke jalur-jalur komoditi yang *establish*. Sehingga kita harus menciptakan jalur-jalur produk tersendiri dengan tidak berkiblat pada negara-negara maju, nilai tambah harus digali lagi dengan adanya dukungan *science dan technology*. Untuk mewujudkan itu semua maka harus tersedia sumber dana dan *participatory buisness plan* yang meliputi perencanaan kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal, sistem dokumentasi dan indikator keberhasilan sekaligus kegagalan. Selain itu harus ditumbuhkan pula semangat untuk mengikuti aturan serta tidak melakukan kegiatan berdasarkan pendekatan proyek sehingga keberlanjutan kegiatan dapat terjamin.

Pada tataran praktis, tahapan optimalisasi sumberdaya lokal untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dapat dilakukan melalui 8 (delapan) langkah pensinergian sebagai berikut:

1. Analisis kegiatan penumbuhan agroindustri pangan lokal dalam konteksnya dengan kegiatan secara keseluruhan, terutama pada tingkat daerah. Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan latar belakang kegiatan.
2. Analisis pemangku kepentingan serta kebutuhan dan kepentingan pihak-pihak yang berhubungan dengan tumbuhnya agroindustri

pangan lokal. Pihak-pihak yang berkepentingan dapat berupa penghasil bahan baku, pengolah, penjual, distributor, pasar, pihak pemerintah dan sebagainya.

3. Analisis masalah dan situasi agar dapat menjembatani kebutuhan dan kepentingan berbagai pihak yang terlibat.
4. Perumusan akar masalah dan berbagai solusi alternatif, baik dalam bentuk *problem tree* maupun *objective tree*.
5. Perumusan tujuan berdasarkan akar masalah yang telah disepakati dengan mengedepankan prinsip ekonomi produktif berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan diversifikasi pangan.
6. Perencanaan unit-unit kegiatan yang harus dilakukan untuk mendukung pencapaian tujuan. Dalam hal ini harus ditekankan pada jenis-jenis pekerjaannya, bukan investasinya.
7. Perincian pekerjaan yang harus dilakukan dalam urutan atau tahapan kerja dan sumberdaya yang diperlukan serta indikator-indikator untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pekerjaan.
8. Analisis asumsi dan risiko kegiatan berikut *contingency plan* yang melingkupinya.

F. Penutup

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, apabila konsumsi pangan tidak cukup dalam kuantitas dan kualitas maka akan menyebabkan terjadinya keadaan gizi kurang atau gizi buruk. Hal tersebut akan menyebabkan daya tahan tubuh rendah, mudah sakit, produktivitas rendah, tumbuh kembang otak tidak optimal, potensi pendidikan rendah dan bermuara pada penurunan kualitas sumberdaya manusia.

Kualitas sumberdaya manusia dapat diperbaiki dan ditingkatkan dengan mewujudkan ketahanan pangan yang berbasis sumberdaya lokal

untuk menumbuhkan industri penghasil nilai tambah. Dengan demikian maka diperlukan optimalisasi sumberdaya lokal untuk menggerakkan perekonomian masyarakat setempat dan untuk meningkatkan keragaman konsumsi pangan.

G. Daftar Pustaka

Flores R. 2001 *Poverty, Food Security and Nutrition*. IFPRI, Washington.

Siregar H. 2007. *RAPBN 2008 dan Kebijakan Belanja Daerah*. Seminar The Asian Foundation, Hotel Mulia, Jakarta. 27 September 2007.

